

**DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPEMILIKAN ASETNYA**
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
1200/Pdt.Bth/2019/PN.Dps)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Winda Gadis Sukardi

Nim: 207201012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP TANGGUNG
JAWAB DIREKSI DALAM KEPEMILIKAN ASETNYA (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1200/Pdt.Bth/2019/PN.Dps)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Winda Gadis Sukardi
Nim: 207201012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

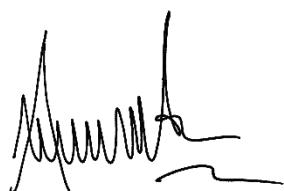
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama: Winda Gadis Sukardi
NIM: 217201012

JUDUL TESIS:

**DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP
TANGGUNGJAWAB DIREKSI DALAM KEPEMILIKAN ASETNYA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR
1200/PDT.BTH/2019/PN.DPS)**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan
Jakarta, 03 Januari 2022
Pembimbing Tesis,



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H. M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Winda Gadis Sukardi

NIM : 207201012

JUDUL TESIS :

Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Kepemilikan Asetnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1200/Pdt.Bth/2019/PN.Dps)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 25 Januari 2022, dengan Majelis Penguji terdiri atas :

1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M. M.Kn.

2. Anggota Penguji : Dr. Gunadi, S.H., M.H

Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing,



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN TANDA PENGESAHAN TESIS

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN TESIS

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

ABSTRAK..... vi

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 15
- C. Tujuan dan Manfaat 15
- D. Kerangka Konsep dan Teori 16
- E. Metode Penelitian 20
- F. Sistematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26

- A. Teori Perusahaan 26
- B. Teori Pertanggungjawaban Pidana 86
- C. Teori Business Judgement Rule 93

BAB III DATA HASIL PENELITIAN 105

- A. Kasus Posisi 105
- B. Pedoman dan Hasil Wawancara 108

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 110

- A. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepemilikan Asetnya Menurut Doktrin Piercing The Corporate Veil 110

B. Keterkaitan Antara Prinsip Piercing The Corporate Veil dengan Prinsip Business Judgment Rule Dalam Tanggungjawab Direksi	131
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	149

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dan izin-Nya maka penlisan tesis yang berjudul “DOKTRIN PIERCING THE COPORATE VEIL TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPEMILIKAN ASETNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 1200/PDT.BTH/2019/PN.DPS) dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Hukum.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi tata penulisan maupun hal-hal substansial dari penulisan tesis ini. Dengan tersusunya tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, karena itu pada kesempatan ini, dengan tulis dari hati yang terdalam penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Prof. Dr. H.K. Martono LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn., Bapak Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.L., dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan saran dan masukan dalam menulis tesis ini;

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan tesis;
6. Bapak Sandro, S.H., M.H selaku praktisi hukum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara dan memberi masukan sebagai narasumber kepada penulis;
7. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Hukum;
8. Seluruh Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dengan baik dan penuh kesabaran;
9. Mama dan Papa tersayang yaitu Herni Sarianti dan Surya Sukardi yang selalu mencerahkan kasih sayang, memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa yang tulus yang tak ternilai bagi penulis;
10. Adik-adik penulis yaitu Evlin Angelita Sukardi dan Jovan Sammy Sukardi yang telah memberikan dukungannya kepada penulis selama penyelesaian penulisan tesis ini;
11. Teman-teman seangkatan di magister terkasih yaitu Monica, Jessica Francis Gunawan dan Arina yang telah membantu, memberikan support dan bersedia untuk mendengarkan keluh kesah penulis;
12. Teman-teman online penulis yaitu Elfonda Dephinta Novia Putri, Noor Shania Farhana, Edeline Evania Ghonarto yang senantiasa memberikan support dan menjadi tempat bagi penulis untuk curhat;
13. Seluruh member NCT terutama Huang Renjun yang telah memberikan kebahagiaan, motivasi, hiburan bagi penulis selama penulisan tesis ini;

14. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Magister Ilmu Hukum, penulis berharap agar tesi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perundang-undangan, serta berguna bagi mahasiswa yang terinspirasi mengadakan penelitian yang terkait dengan tesis ini.

Jakarta, Januari 2022

Penulis,

Winda Gadis Sukardi

ABSTRAK

- (A) Nama : Winda Gadis Sukardi ; NIM : 2701012
- (B) Judul Tesis : Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Tanggungjawab Direksi Dalam Kepemilikan Asetnya
- (C) Halaman Tesis : vii + 158 + 11 + 2021
- (D) Kata Kunci : *Piercing the corporate veil, business judgement rule, perseroan terbatas.*
- (E) Isi :
Doktrin *piercing the corporate veil* adalah doktrin yang membebankan tanggung jawab kepada direksi jika direksi terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perseroan. Business Judgement Rule merupakan doktrin yang bertujuan melindungi kebijakan atau keputusan bisnis yang diambil oleh direksi atas nama perseroan terbatas. Business Judgement Rule memungkinkan direksi untuk melepaskan tanggung jawab pribadi, atas kesalahan pengambilan keputusan bisnis yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian atau bahkan kepailitan. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab direksi dalam kepemilikan asetnya dalam doktrin *piercing the corporate veil* dan bagaimana keterkaitan antara doktrin *business judgement rule* dan *piercing the corporate veil*. Metode penelitian ini, adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Doktrin *Piercing The Corporate Veil* memberikan dampak secara jelas apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi sehingga direksi wajib bertanggungjawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan dan antara kedua doktrin tersebut saling menjatuhkan satu sama lain maka kedua doktrin tersebut tidak bisa disatukan. Disarankan agar direksi lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya dan prinsip *Business Judgement Rule* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dipertegas dan diperjelas pengaturannya.
- (F) Daftar Acuan : 40 (1947 - 2014).
- (G) Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Winda Gadis Sukardi.